



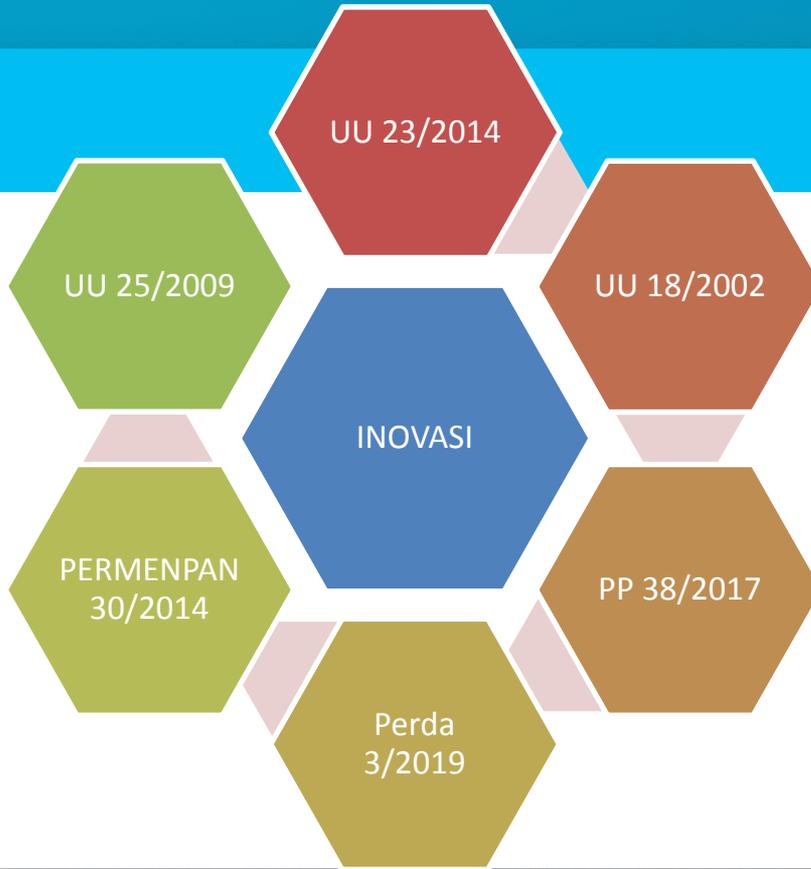
KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK GUNA PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

AGUSTINUS A.S, S.STP, MM

Kepala Subbagian Pelayanan Publik Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kebumen, 4 Desember 2019

LANDASAN KEBIJAKAN INOVASI DAERAH



1 Inovasi Tata Kelola Pemerintahan

2 Inovasi Pelayanan Publik

3 Inovasi Masyarakat



KOLABORASI PENGEMBANGAN **INOVASI** DAERAH

(Disepakati oleh Kementerian PPN/Bappenas)

- Kementerian PANRB dan LAN membantu dalam **manajemen dan peningkatan kapasitas** Inovasi Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri membuat **Indeks Inovasi Daerah**.



PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

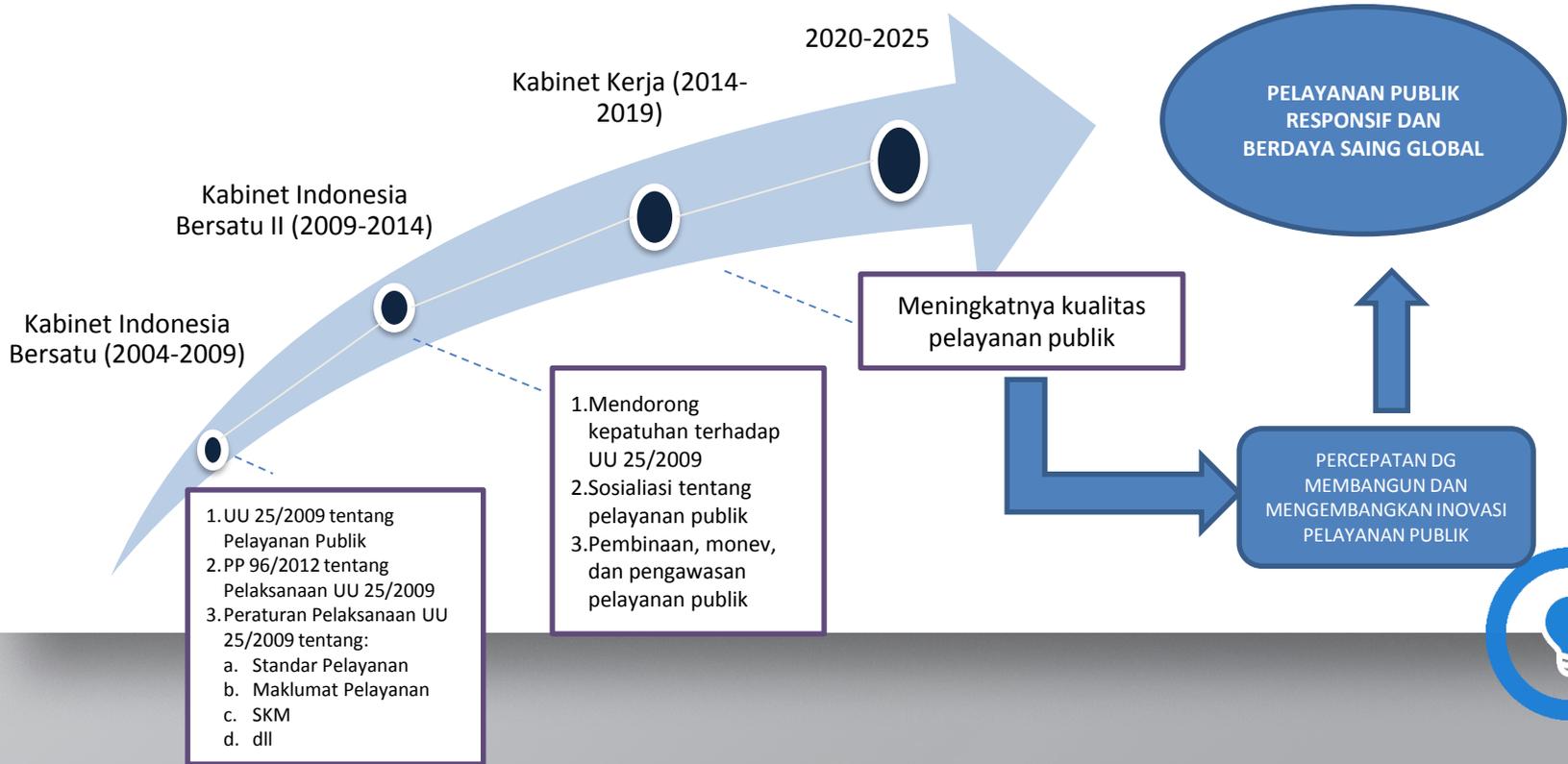
RUANG LINGKUP PELAYANAN PUBLIK

- Barang publik (pengadaan dan penyaluran)
- Jasa publik (penyediaan jasa)
- Administratif (pelayanan administrasi)

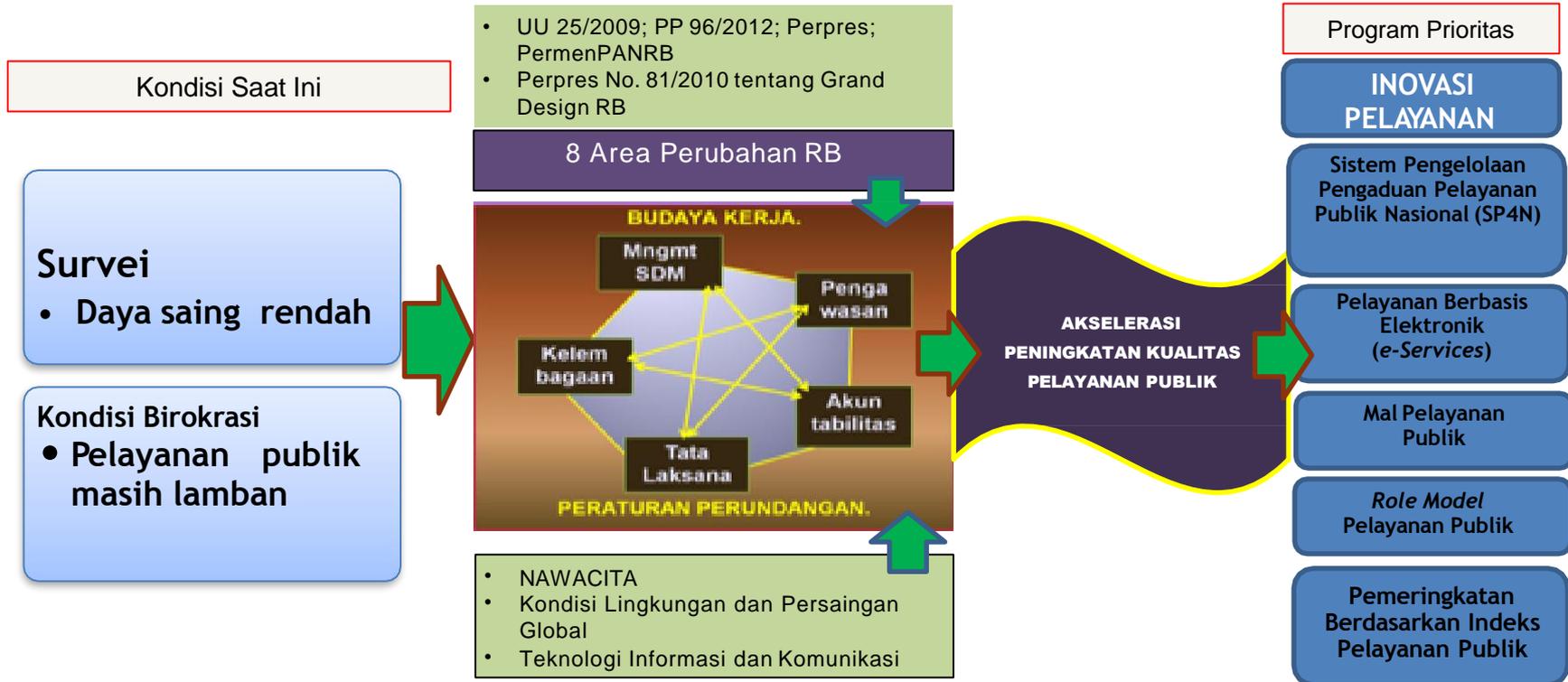
PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

- Instansi penyelenggara negara
- Korporasi (BUMN, BUMD)
- Lembaga independen
- Swasta/Organisasi Masyarakat yang melaksanakan Misi Negara karena UU

ROAD MAP BIDANG PELAYANAN PUBLIK



KEBIJAKAN PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK





ARAH PEMBINAAN **INOVASI** PELAYANAN PUBLIK

(Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2014)



PENGERTIAN:

Inovasi Pelayanan Publik adalah **terobosan** jenis pelayanan baik yang merupakan **gagasan/ide kreatif orisinal** dan/atau **adaptasi/modifikasi** yang memberikan **manfaat bagi masyarakat**, baik secara **langsung maupun tidak langsung**.



PEMBINAAN:

- **Menumbuhkan dan membudayakan:** Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
- **Pengembangan:** Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, melalui Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), Forum Replikasi
- **Pelembagaan:** Inovasi Pelayanan Publik menjadi program (dan dianggarkan), bagian dari tupoksi, memiliki dasar hukum, dan budaya organisasi.



INOVASI PELAYANAN PUBLIK

‘one agency one innovation’

“Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) wajib menciptakan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahun”

Tujuan:

Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mencapai pelayanan publik kelas dunia.

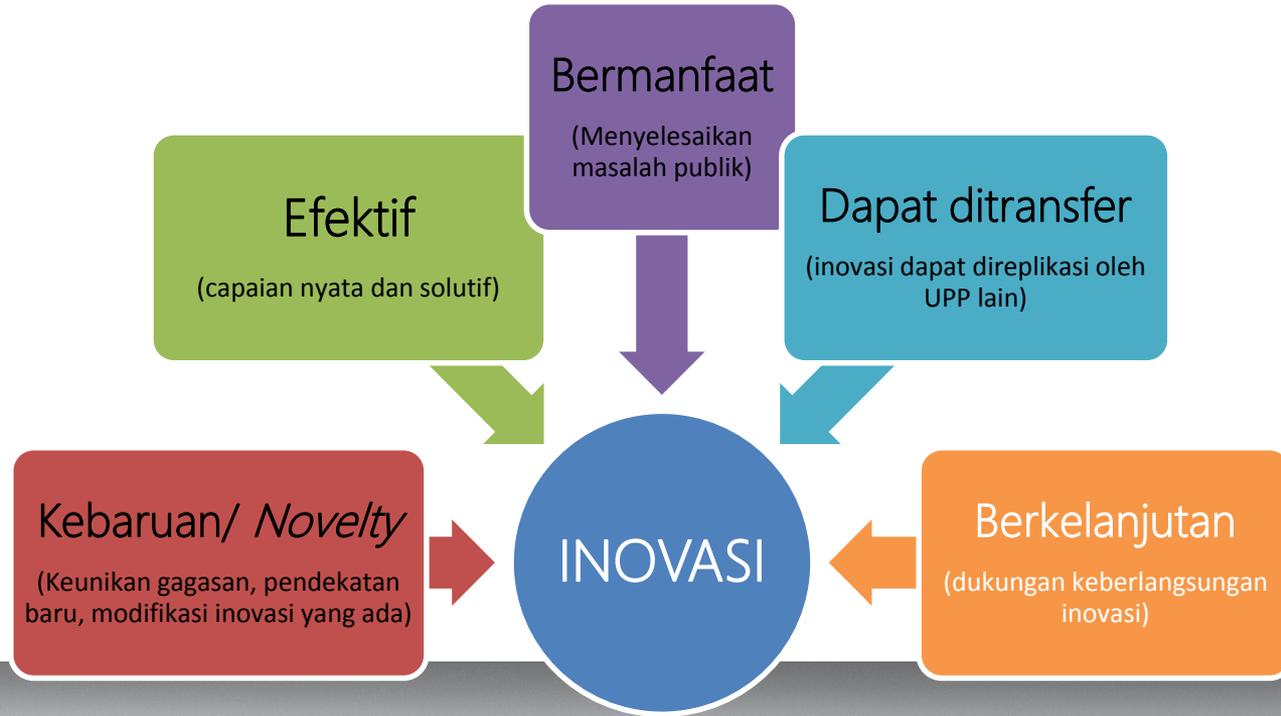
Outcome:

- Meningkatkan confidence para penyelenggara pelayanan publik.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap perubahan yang dilakukan Pemerintah
- **Peraturan Menteri PANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik**

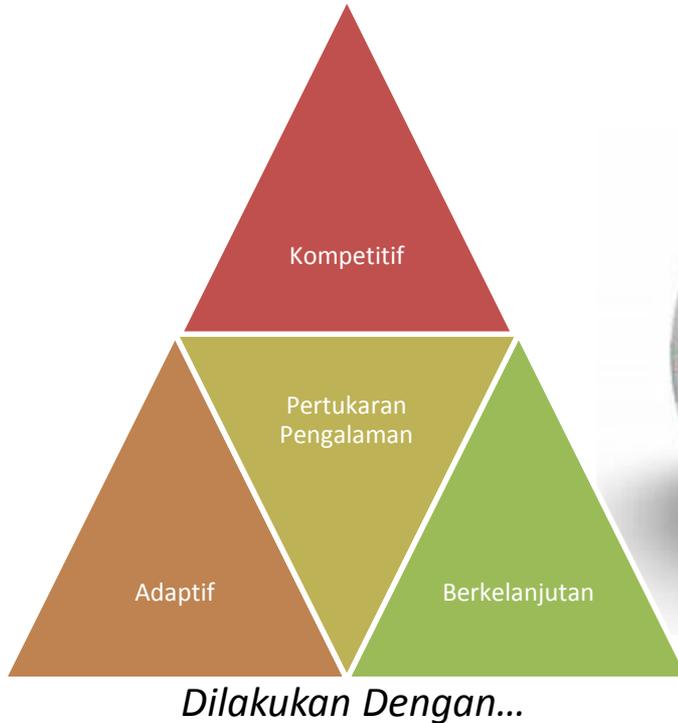
“Terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/ modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung”



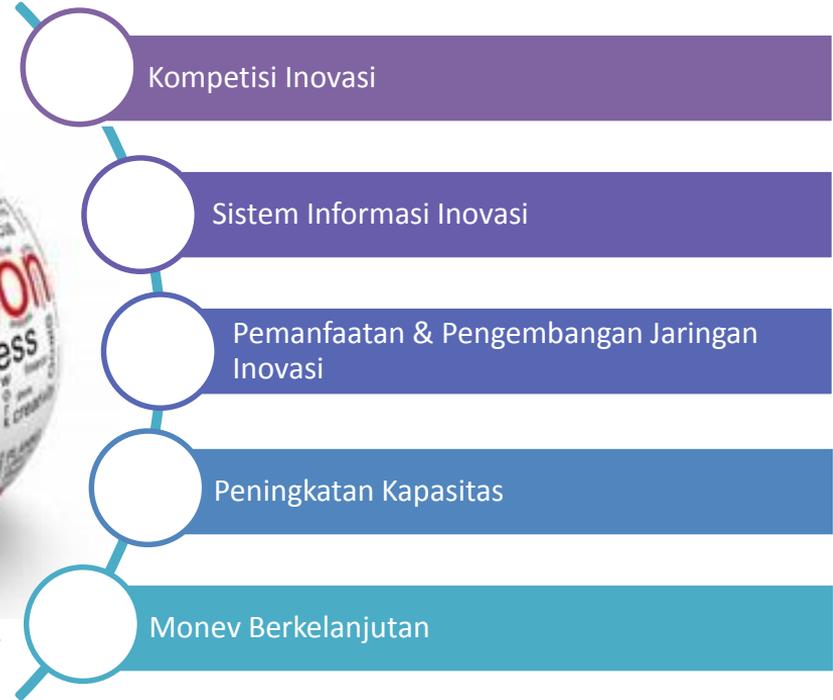
KRITERIA **INOVASI** PELAYANAN PUBLIK



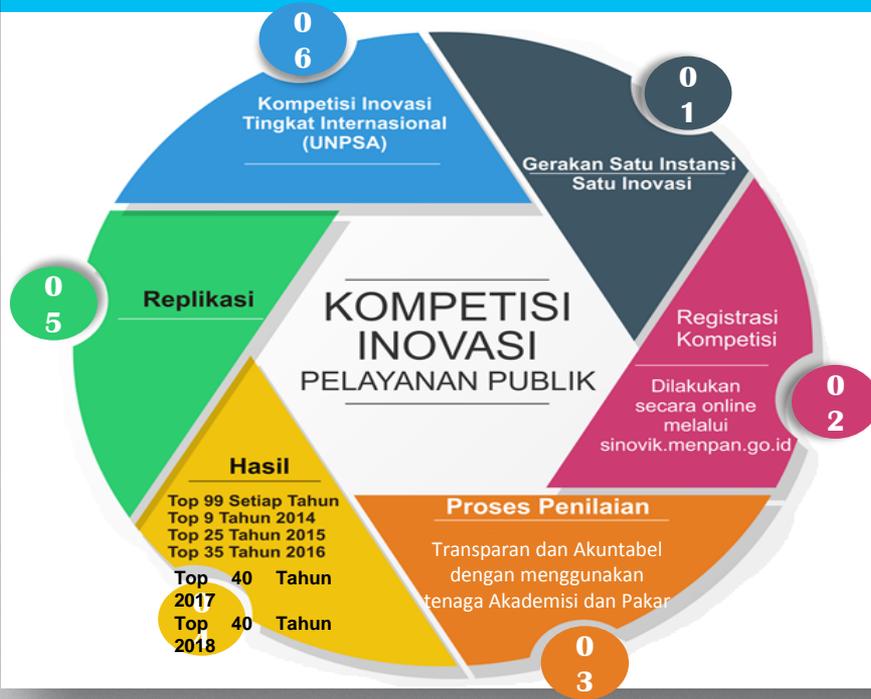
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK



Fasiltasi Dengan...



KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK



Jateng
guyong

KIPP
KORUPSI
Mboten
Ngapusi

KIPP 2019
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

TOP 10 @ Rp 5.000.000,-
+ Piagam Penghargaan

Tema : Inovasi Pelayanan Publik Untuk Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Berkelanjutan Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Tetap Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Periode Pengujian : 1 Maret 2019 – 1 April 2019
Penyerahan Penghargaan : Agustus 2019

JIPP JATENG
Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Jawa Tengah

ONE AGENCY INNOVATION

TUJUAN KOMPETISI **INOVASI** PELAYANAN PUBLIK



1. Menjaring, mendokumentasikan, mendiseminasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyelenggara pelayanan publik yang inovasinya ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik;
3. Memotivasi penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
4. Meningkatkan citra penyelenggara pelayanan publik;
5. Menjadi sarana pertukaran pengalaman dan pembelajaran dalam rangka pengembangan sistem JIPP Nasional.

HASIL KOMPETISI **INOVASI** PELAYANAN PUBLIK



Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
▪ Inovasi yang terdaftar di Sinovik	515	1.189	2.476	3.054	2.824	3.156
▪ Hasil Tahap: <i>Desk Evaluation</i>	Top 99	Top 99	Top 99	Top 99	Top 99	Top 99
▪ Hasil Tahap: ➤ Presentasi dan Wawancara ➤ Verifikasi Lapangan	Top 9	Top 25	Top 35	Top 40	Top 40	Top 45
▪ Dasar hukum KIPP	SE Menteri PANRB 9/2014	SE Menteri PANRB 15/2014	Peraturan Menteri PANRB 15/2015	Peraturan Menteri PANRB 19/2016	Peraturan Menteri PANRB 3/2018	Peraturan Menteri PANRB 5/2019

PETA SEBARAN TOP 99 **INOVASI** PELAYANAN PUBLIK



**SEBARAN INOVASI
MASIH
BELUM MERATA**

DID untuk Inovasi Pelayanan Publik....


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-702 /MK.07/2019
 Tanggal : 24 September 2019
 Sifat : Segera
 Hal : Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan telah disetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019, dapat disampaikan daftar Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
5. Dana Insentif Daerah;
6. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
7. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
8. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
9. Dana Desa.

Daftar rincian alokasi secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Demikian daftar rincian dimaksud untuk dapat disebarluaskan dan dipergunakan sebagai dasar kebijakan penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah.

Agar pemerintah daerah tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah (Kementerian Keuangan/Kementerian Lembaga lain) yang menawarkan berbagai proyek yang berkenaan dengan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020 ini.


 Menteri Keuangan,
 Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:
 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Ke. PPK.23/2019

Gedung Djuanda I Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
 Telepon 1500420 Faksimile (021) 3509443 Situs www.kemkeu.go.id

Alokasi Dana Transfer Daerah 2020

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Dana Desa	Dana Insentif Daerah	Dana Alokasi Khusus Fisik	Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Dana Insentif Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Bagi Hasil	Dana Otonomi Khusus	Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Dana Desa
110	Provinsi Aceh Tengah		12.079.963	10.070.267	12.413.200	6.473.906	9.684.141	6.654.624				
111	Kab. Bireuen		13.130.493	10.649.276								
112	Kab. Bireuen		13.853.104	10.271.252	11.699.387	6.564.076						
113	Kab. Bireuen		13.812.147	10.648.840								
114	Kab. Bireuen		13.641.024	11.095.262	10.665.211							
115	Kab. Bireuen		13.718.229	11.276.545	11.077.065							
116	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
117	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
118	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
119	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
120	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
121	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
122	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
123	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
124	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
125	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
126	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
127	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
128	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
129	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
130	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
131	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
132	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
133	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
134	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
135	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
136	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
137	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
138	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
139	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
140	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					
141	Kab. Bireuen		13.687.402	11.746.518	10.294.829	10.177.969	13.173.210					

Prov dan 6 Kab/Kota mendapatkan DID krn Inovasi masuk top 45 2019.

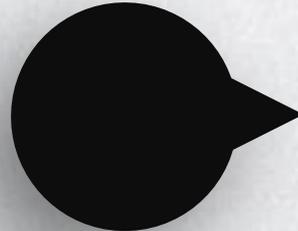


± 8M/
Inovasi

JARINGAN *INOVASI PELAYANAN PUBLIK*



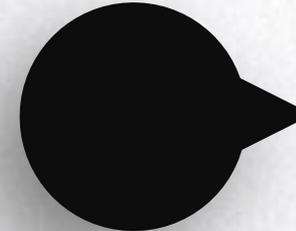
Adalah Simpul Kerja Sama Antarlembaga Yang Mempunyai Minat Dalam Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik



Terdiri Dari Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dan Lembaga Mitra Pembangunan



Meliputi Informasi, Perencanaan, Anggaran, Operasional, Keberlanjutan, Replikasi Dan Pengembangan Kapasitas, Dan Partisipasi Masyarakat



Jaringan Kerja Sama Dapat Membentuk Simpul (Hub) Dan Kolaborasi, Baik Regional, Nasional Dan Internasional



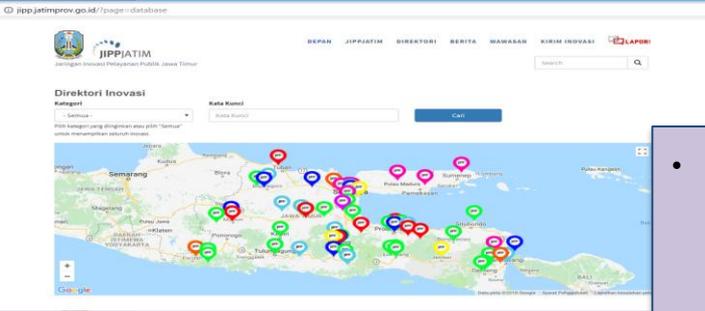
Peraturan
Menteri
PANRB
30/2014

Masalah pelayanan publik terus berkembang, karena itu harus ada sarana belajar dan mengamati perkembangan inovasi pelayanan publik

Agar pimpinan daerah, ASN, dan masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif tentang kemajuan pelayanan publik di satu instansi

Lewat *innovation hub*, masyarakat dapat berinteraksi dengan para penyedia pelayanan publik dan memberikan *feedback* atas inovasi pelayanan yang telah ada

JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

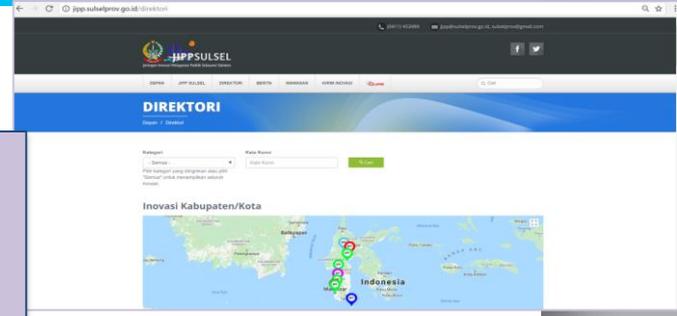


[jipp.jatimprov.go.id](http://jipp.jatimprov.go.id/?page=database)

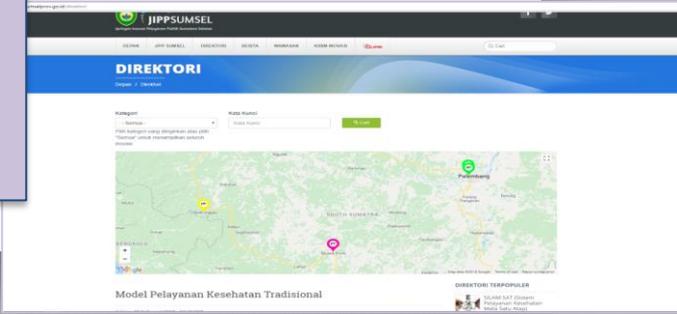


jipp.jatengprov.go.id

- Sebagai sarana belajar dan mengamati inovasi pelayanan publik karena masalah pelayanan publik terus berkembang
- Agar pimpinan instansi, ASN, dan masyarakat dapat mengetahui kemajuan pelayanan publik
- Agar masyarakat dapat berinteraksi dengan penyedia pelayanan publik untuk memberikan *feedback* atas inovasi



jipp.sulseprov.go.id

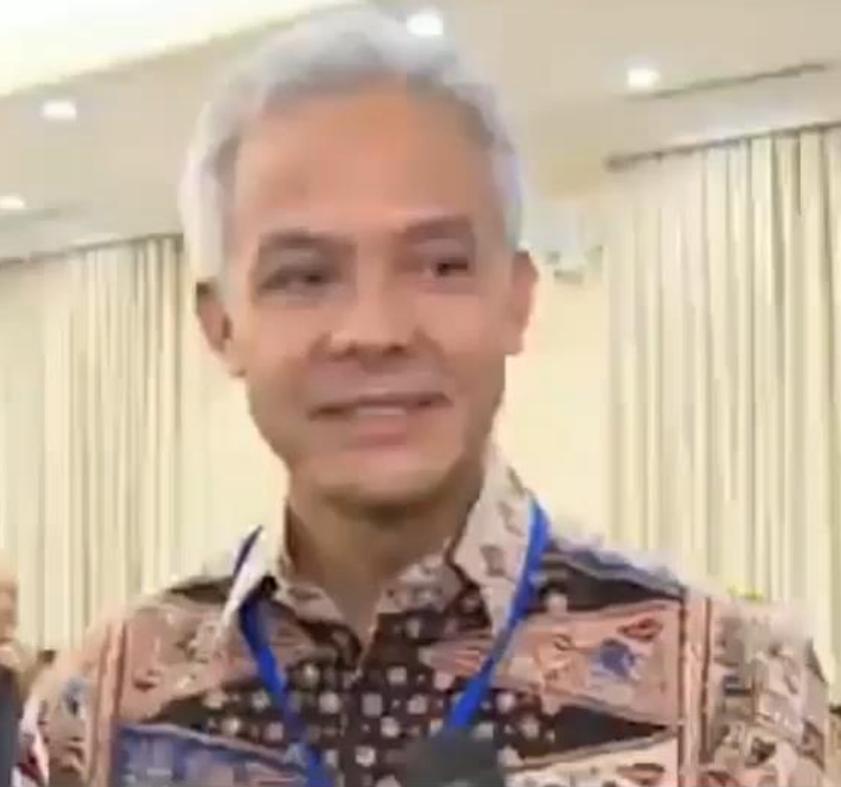


jipp.sumselprov.go.id



JAKARTA

KOMPAS TV



KOMPAS
SIANG

JAWA TENGAH RAIH PENGHARGAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Kompas TV

A TIMUR, GAGALKAN PENYELUNDUPAN 16.000 BENIH LOBSTER

GUBE

SUBSCRIBE





“jadikan inovasi pelayanan publik bukan hanya sebagai kebutuhan tetapi jadikan sebagai suatu tradisi, Penghargaan bukanlah tujuan tapi kepuasan masyarakatlah yang harus kita prioritaskan”

Matursuwun